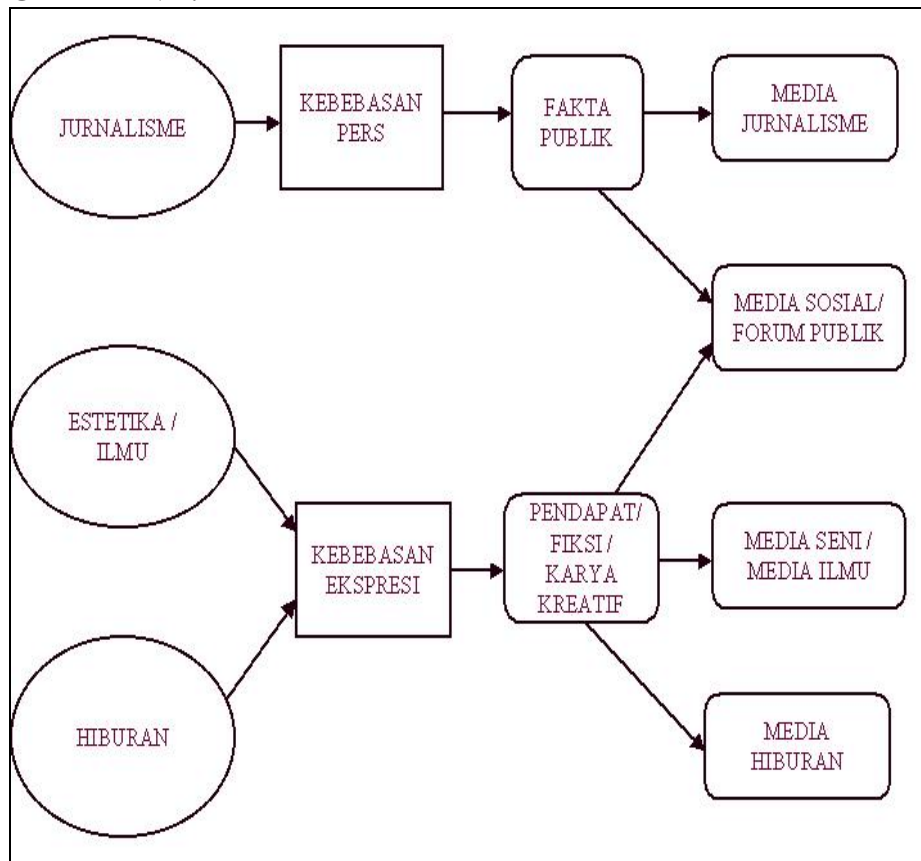


## VII. MEDIA DAN PUBLIC SPHERE

Bagian ini sebagai bahan pembahasan tentang faktor-faktor dalam kehidupan publik, dalam kaitan dengan kekuasaan negara dan pasar, serta opini publik.

Karakteristik media dalam konteks kehidupan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR VII.1



Proses institusionalisasi dari media bertolak dari landasan dalam memeroses informasi. Untuk itu dikenal kaidah dalam 2 sisi, pertama yaitu kaidah jurnalisme, estetika dan keilmuan serta hiburan. Kedua adalah ruang sosial yang mendukung bagi proses yang pertama tersebut, yaitu kaidah kebebasan pers dan kebebasan ekspresi.

Jurnalisme bertolak dari epistemologi yang membawa konsekuensi dalam metodologi dan konteks keberadaannya dalam memeroses fakta publik. Landasan operasi dari epistemologi jurnalisme adalah fakta publik dalam kaitan dengan ruang publik (*public-*

*sphere*). Begitu pula epistemologi dalam proses keilmuan dimaksudkan untuk mengejar validitas dan kebenaran.

Kebebasan pers adalah sebutan populer untuk norma yang menjamin hak warga untuk memperoleh informasi sebagai dasar dalam membentuk sikap dan pendapat, baik dalam konteks masalah publik maupun estetis. Untuk itu diperlukan media massa sebagai lembaga (institusi) kemasyarakatan, yang menjalankan fungsi imperatif dari kepentingan warga atas informasi publik. Hak untuk memperoleh informasi dan membentuk sikap dan pendapat perlu dipilah dalam 2 dimensi, yaitu kebebasan pers dan kebebasan ekspresi (*freedom of the expression*). Dalam kedua dimensi ini dapat dipilah pula 2 golongan media massa atas dasar fungsinya, yaitu media hiburan yang fokusnya untuk memenuhi kepentingan pragmatis psikhis, dan media pers/jurnalisme yang berfokus untuk kepentingan pragmatis sosial khalayak media.

Kebebasan dalam aspek pertama mewujudkan melalui media hiburan yang berkonteks estetis, yaitu institusi yang menjalankan fungsi untuk memenuhi kepentingan pragmatis psikhis, kepentingan bersifat subyektif warga masyarakat. Signifikansi informasi hiburan berada dalam konteks kebebasan ekspresi yaitu peningkatan penghayatan nilai dan *sharing* dalam kehidupan kultural. Hiburan disini dapat bergerak dari tingkat kesenangan pragmatis psikhis, sampai ke tingkat penghayatan estetis dengan *sharing* dalam kehidupan kultural. Informasi berupa karya kreatif seperti sastra, teater, sinetron, periklanan, lukisan, atau potret perempuan cantik, berada dalam konteks kebebasan ekspresi, karenanya wacana dan penilaian yang menyertainya bertolak dari etika dan estetika.

Kebebasan dalam aspek kedua yaitu melalui media pers atau biasa disebut media jurnalisme, dalam fungsinya berkonteks ke dalam ruang publik untuk menyampaikan informasi jurnalisme. Informasi jurnalisme pada dasarnya menyangkut fakta-fakta yang berkonteks pada ruang publik. Proses memperoleh dan menyampaikan informasi jurnalisme yang terkandung dalam norma kebebasan pers, merupakan basis dalam kehidupan publik agar warga masyarakat dapat ikut ambil bagian (*sharing*) dalam proses demokrasi kehidupan negara. Pengertian kebebasan pers yang berdimensi politik dan kebebasan ekspresi yang berdimensi kultural sering dicampur-adukkan. Informasi jurnalisme dilihat dari etika dan epistemologi yang bertumpu pada kebenaran empiris (lihat: Rivers, 1969)

Informasi jurnalisme yang diwujudkan dalam berbagai format, seperti berita (*straight news* ataupun *indepth news*), features, artikel opini (*opinioted pieces*), *talkshows* dalam media penyiaran, dan lainnya. Seluruh format ini disebut sebagai aktivitas pemberitaan, bertumpu pada fakta publik yang layak dijadikan isu melalui media massa. Kehadiran informasi

jurnalisme bertolak dari asumsi bahwa dengan motif pragmatis sosial warga masyarakat menjadikan informasi publik dari media massa sebagai referensi dan dasar alam pikirannya dalam memproses diri dalam institusi politik, ekonomi dan kultural. Ini bisa disebut sebagai pemenuhan hak untuk mengetahui (*right to know*) dalam konteks keberadaannya di ruang publik. Keberadaan dan peranan warga dalam institusi politik, ekonomi dan kultural ini menentukan sifat, kualitas dan kuantitas informasi publik yang diperlukannya. Disebutkan antara lain:

The mass media and public opinion are inextricably wed. The central role accorded the public in a liberal democracy requires at bare minimum information on which judgment about leadership may be made. A central question of democratic theory – how are public preference transmitted to decision makers? – question about communication. At other extreme, communication is inherent in such analytical tools as the “normal vote,” where some information must penetrate the shield of every voter who defects from the long term force of partisanship. (Zukin, 1981: 359)

Dengan demikian kebebasan pers bukan hanya menyangkut keberadaan media pers, tetapi juga mencakup suatu rantai dalam proses demokrasi. Sekaligus keberadaan institusi pers bebas dilihat akuntabilitas sosialnya dalam konteks proses ini. Adapun proses demokrasi mencakup: dari dinamika kehidupan warga masyarakat yang dikenal sebagai fakta publik (*public fact*) yang memiliki signifikansi sebagai masalah publik (*public issue*). Masalah (isu) publik dapat diartikan sebagai fakta yang berasal dari, dan respon warga masyarakat terhadap kekuasaan umumnya, dan kekuasaan negara khususnya. Isyu publik kemudian disiarkan secara bebas (otonom dan independen) dalam kaidah obyektivitas oleh media pers sebagai informasi jurnalisme. Lebih jauh informasi jurnalisme akan menjadi sumber dalam proses pembentukan pendapat publik (*public opinion*). Pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai respon terhadap masalah publik menjadi dasar dalam kehidupan publik. Dengan begitu tidak semua fakta dalam masyarakat relevan sebagai dasar pembentukan pendapat publik.

Pendapat publik dapat diartikan sebagai respon pro dan kontra warga masyarakat terhadap masalah publik yang bersifat aktual. Dinamika dari pro dan kontra inilah menjadi dasar bagi kebijakan publik (*public policy*), baik berupa keputusan maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam melayani warga masyarakat. Lebih jauh sebagai dasar dari kebijakan dalam memberikan pelayanan publik (*public service*). Muara dari seluruh proses ini adalah pelayanan publik dan akuntabilitas (*accountability*) atau pertanggungjawaban, sebagai ciri

dari birokrasi publik (pemerintahan) dalam norma demokrasi. Dengan demikian basis kehidupan warga dalam ruang publik adalah adanya informasi menyangkut fakta publik yang bersifat obyektif sehingga dapat membentuk pendapat publik untuk dapat ambil sebagai bagian (*sharing*) dalam kehidupan publik. Dengan demikian akuntabilitas atau pertanggungjawaban sosial dari media jurnalisme dilihat dengan parameter yang melekat dalam proses yang berlangsung di ruang publik.

Istilah ruang publik (*public sphere*) menjadi penting dalam mengkaji keberadaan media. Untuk itu dapat disimak pandangan Habermas berikut:

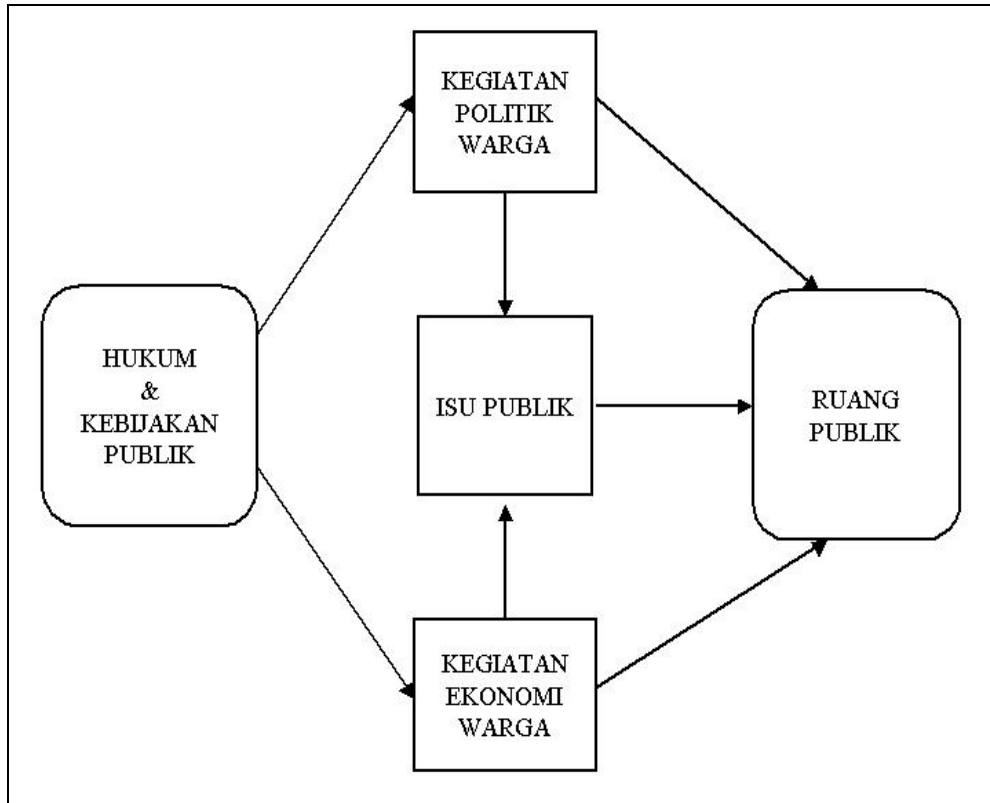
The Concept. By “the public sphere” we mean first of all a realm of our social life in which something approaching public opinion can be formed. Access is guaranteed to all citizens. A portion of the public sphere comes into being in every conversation in which private individuals assemble to form a public body.’ They then behave neither like business or professional people transacting private affairs, nor like members of a constitutional order subject to the legal constraints of a state bureaucracy. Citizens behave as a public body when they confer in an unrestricted fashion — that is, with the guarantee of freedom of assembly and association and the freedom to express and publish their opinions — about matters of general interest. In a large public body, this kind of communication requires specific means for transmitting information and influencing those who receive it. Today, newspapers and magazines, radio and television are the media of the public sphere. We speak of the political public sphere in contrast, for instance, to the literary one, when public discussion deals with objects connected to the activity of the state. Although state authority is, so to speak, the executor of the political public sphere, it is not a part of it. To be sure, state authority is usually considered “public” authority, but it derives its task of caring for the wellbeing of all citizens primarily from this aspect of the public sphere. Only when the exercise of political control is effectively subordinated to the democratic demand that information be accessible to the public, does the political public sphere win an institutionalized influence over the government through the instrument of law-making bodies. The expression public opinion refers to the tasks of criticism and control which a public body of citizens informally — and, in periodic elections, formally as well — practices vis-à-vis the ruling structure organized

in the form of a state. Regulations demanding that certain proceedings be public [Publizitätsvorschriften] — for example, those providing for open court hearings — are also related to this function of public opinion. The public sphere as a sphere which mediates between society and state, in which the public organizes itself as the bearer of public opinion, accords with the principle of the public sphere<sup>3</sup> — that principle of public information which once had to be fought for against the arcane policies of monarchies and which since that time has made possible the democratic control of state activities.

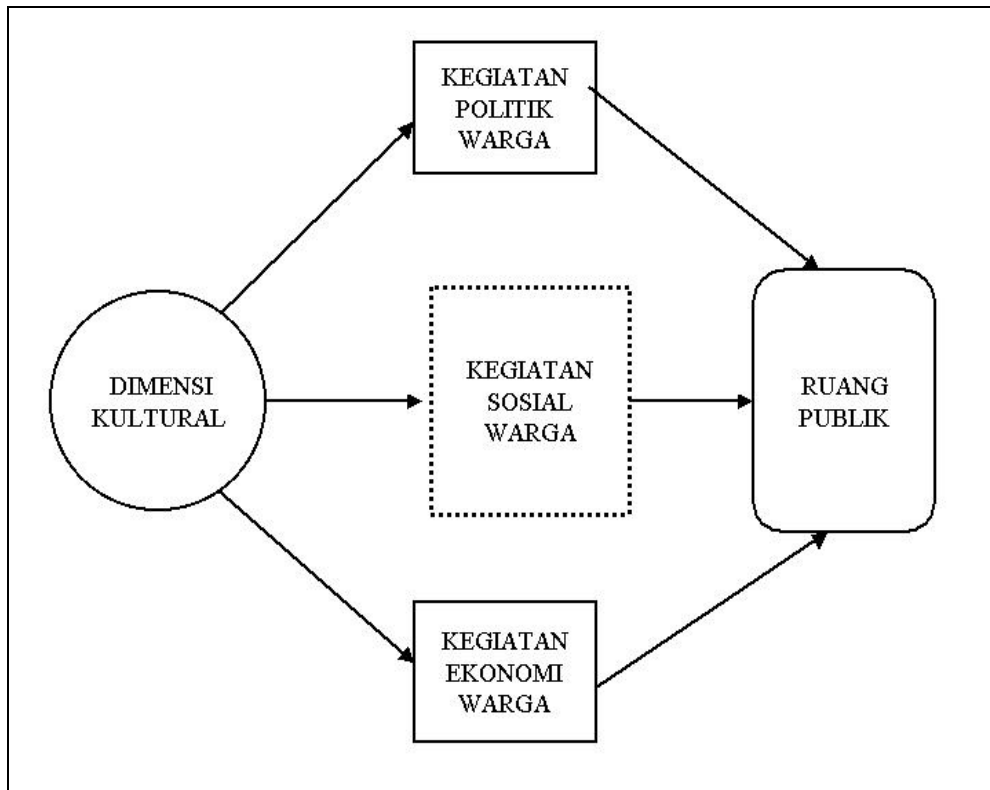
It is no coincidence that these concepts of the public sphere and public opinion arose for the first time only in the eighteenth century. They acquire their specific meaning from a concrete historical situation. It was at that time that the distinction of “opinion” from “opinion publique” and “public opinion” came about. Though mere opinions (cultural assumptions, normative attitudes, collective prejudices and values) seem to persist unchanged in their natural form as a kind of sediment of history, public opinion can by definition come into existence only when a reasoning public is presupposed. Public discussions about the exercise of political power which are both critical in intent and institutionally guaranteed have not always existed — they grew out of a specific phase of bourgeois society and could enter into the order of the bourgeois constitutional state only as a result of a particular constellation of interests. (Habermas, 1989, 102 –103)

Kerangka konseptual tentang ruang public dapat digambarkan berturutan di bawah ini:

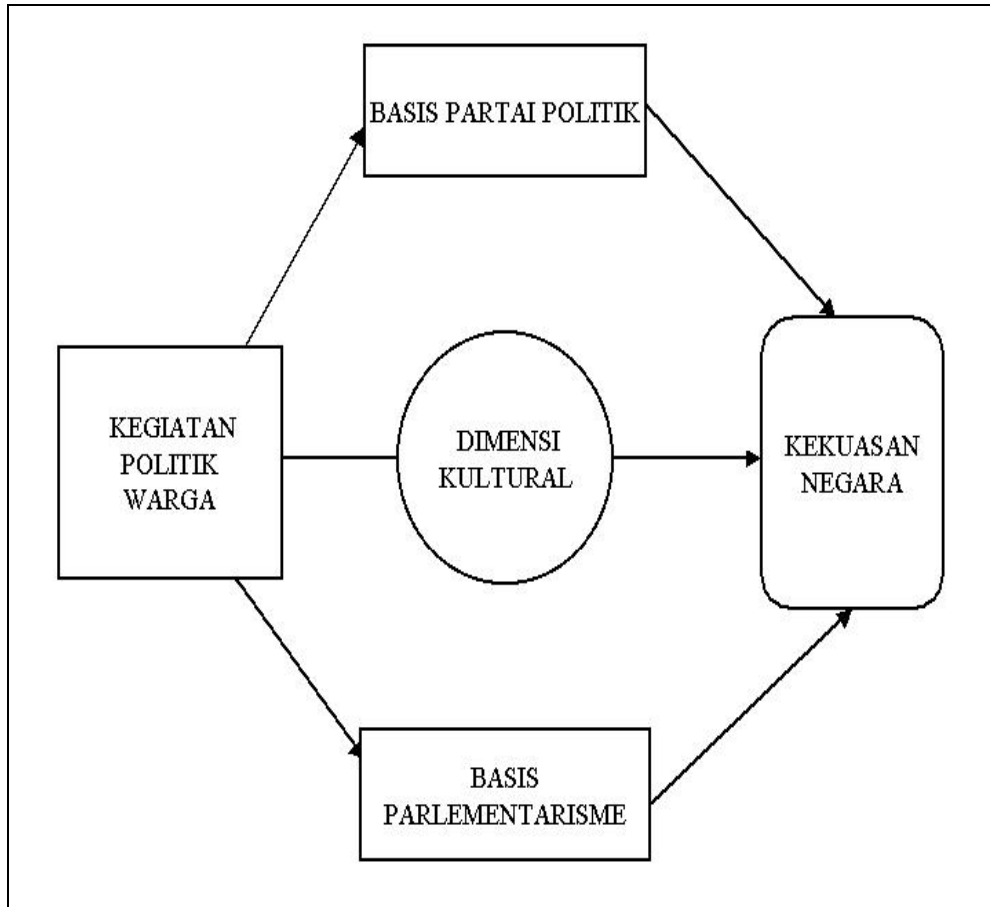
GAMBAR VII.2



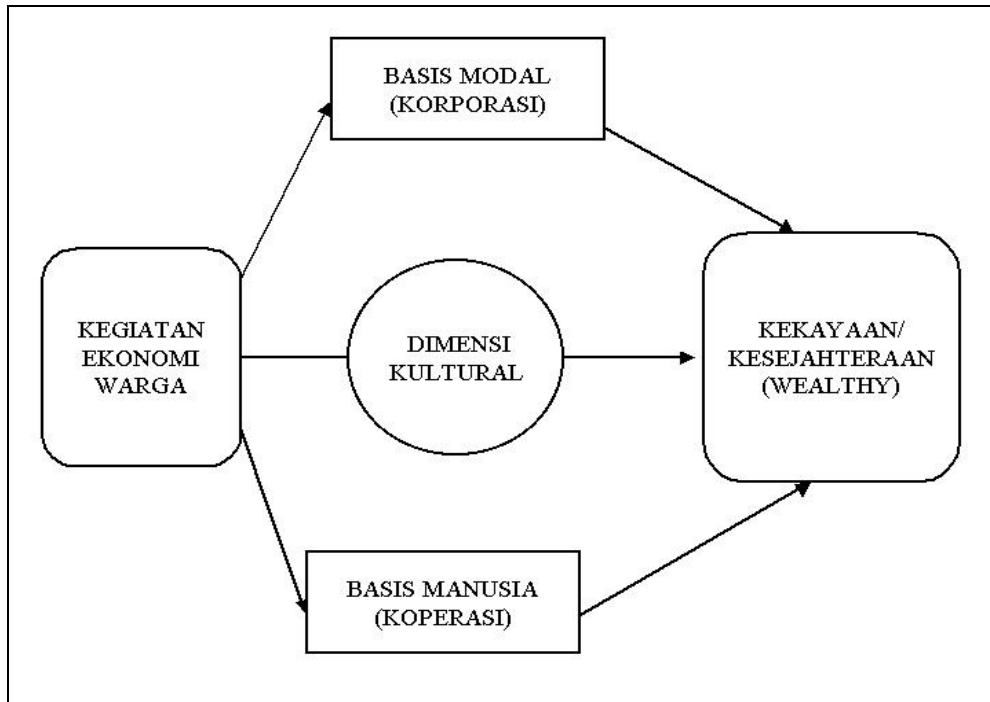
GAMBAR VII.3



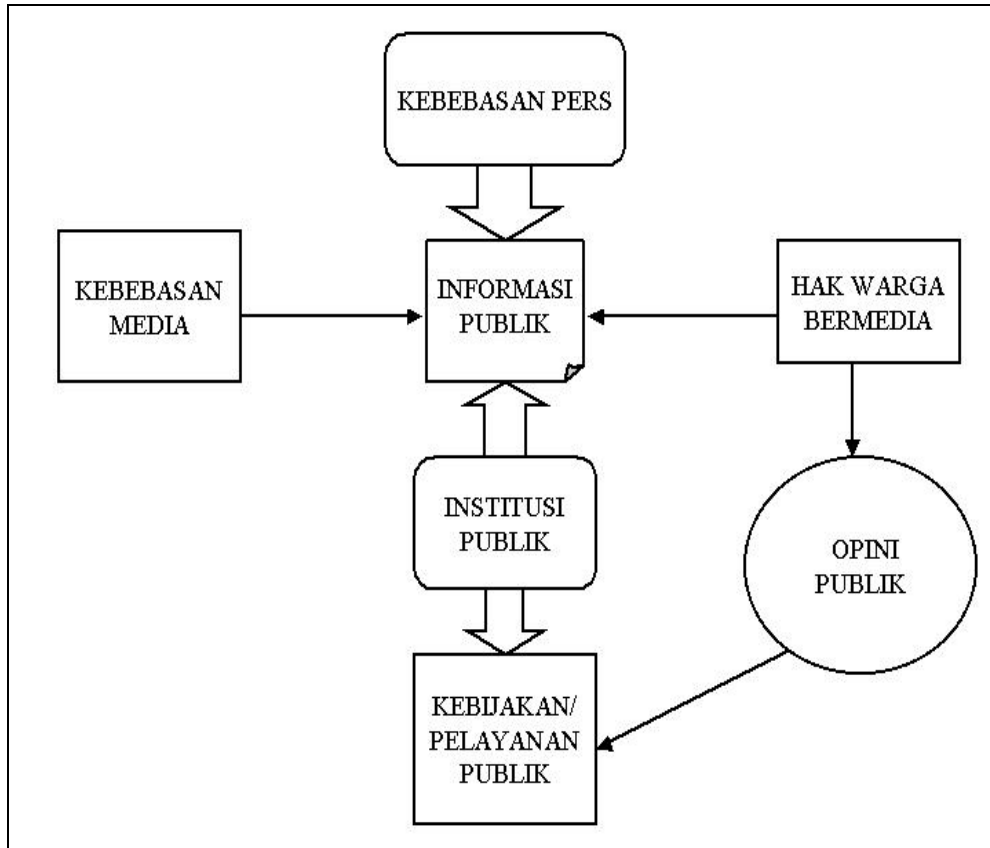
GAMBAR VII.4



GAMBAR VII.5

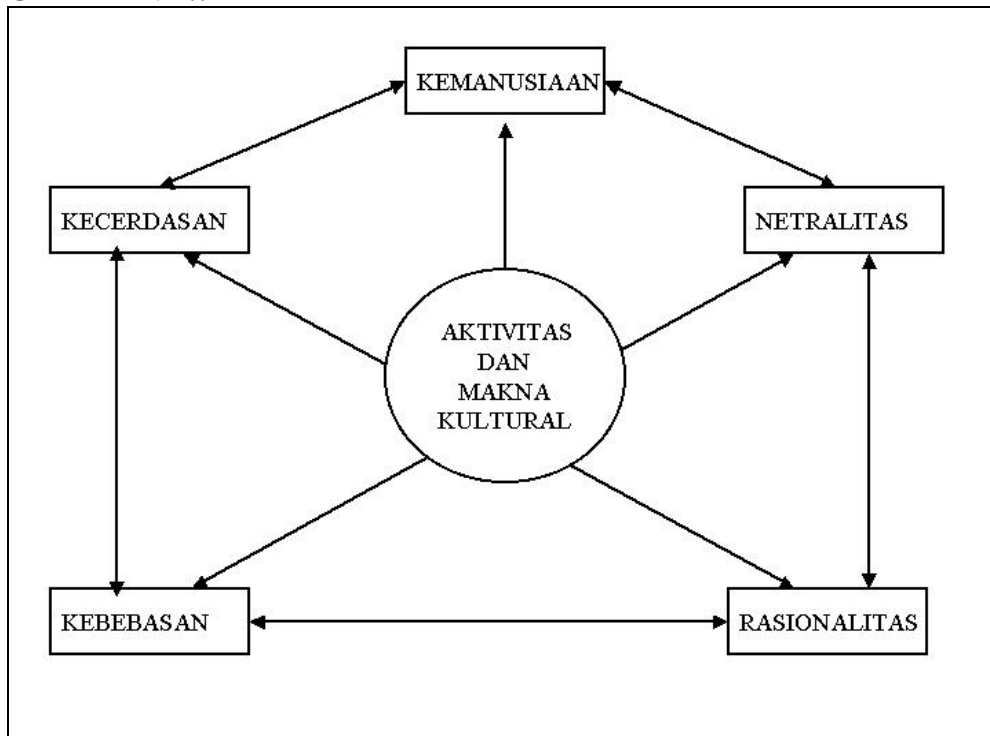


GAMBAR VII.6



Dalam pandangan normatif, idealisasi ruang publik adalah sebagai berikut:

GAMBAR VII.7



Berkaitan dengan keberadaan media di ruang publik, proses produksi media dapat dilihat sebagai bagian dalam sistem industri.

Interested parties explain the culture industry in technological terms. It is alleged that because millions participate in it, certain reproduction processes are necessary that inevitably require identical needs in innumerable places to be satisfied with identical goods. The technical contrast between the few production centres and the large number of widely dispersed consumption points is said to demand organisation and planning by management. Furthermore, it is claimed that standards were based in the first place on consumers' needs, and for that reason were accepted with so little resistance. The result is the circle of manipulation and retroactive need in which the unity of the system grows ever stronger. No mention is made of the fact that the basis on which technology acquires power over society is the power of those whose economic hold over society is greatest. A technological rationale is the rationale of domination itself. It is the coercive nature of society alienated from itself. Automobiles, bombs, and movies keep the whole thing together until their levelling element shows its strength in the very wrong which it furthered. It has made the technology of the culture industry no more than the achievement of standardisation and mass production, sacrificing whatever involved a distinction between the logic of the work and that of the social system. This is the result not of a law of movement in technology as such but of its function in today's economy. The need which might resist central control has already been suppressed by the control of the individual consciousness. The step from the telephone to the radio has clearly distinguished the roles. The former still allowed the subscriber to play the role of subject, and was liberal. The latter is democratic: it turns all participants into listeners and authoritatively subjects them to broadcast programs which are all exactly the same. No machinery of rejoinder has been devised, and private broadcasters are denied any freedom. They are confined to the apocryphal field of the "amateur," and also have to accept organisation from above. But any trace of spontaneity from the public in official broadcasting is controlled and absorbed by talent

scouts, studio competitions and official programs of every kind selected by professionals. Talented performers belong to the industry long before it displays them; otherwise they would not be so eager to fit in. The attitude of the public, which ostensibly and actually favours the system of the culture industry, is a part of the system and not an excuse for it. If one branch of art follows the same formula as one with a very different medium and content; if the dramatic intrigue of broadcast soap operas becomes no more than useful material for showing how to master technical problems at both ends of the scale of musical experience - real jazz or a cheap imitation; or if a movement from a Beethoven symphony is crudely "adapted" for a film sound-track in the same way as a Tolstoy novel is garbled in a film script: then the claim that this is done to satisfy the spontaneous wishes of the public is no more than hot air. We are closer to the facts if we explain these phenomena as inherent in the technical and personnel apparatus which, down to its last cog, itself forms part of the economic mechanism of selection. In addition there is the agreement - or at least the determination - of all executive authorities not to produce or sanction anything that in any way differs from their own rules, their own ideas about consumers, or above all themselves. (Adorno, Horkheimer, 1993: 33)

Pandangan tentang karakteristik ruang publik sering bersifat normatif. Dalam kenyataannya, kondisi ruang publik tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Dengan kata lain, ruang publik tidak menjadi ajang yang berarti dalam memeroses warga dalam kehidupan politik dan ekonomi yang berarti, tetapi hanya menampung proses yang rendah mutunya. Sebagaimana disebutkan McKee berikut:

There are five major themes common to popular and academic concerns about the public sphere in Western countries at the start of the twenty-first century: that it's too trivialized; that it's too commercialized; that it relies too much on spectacle rather than rational argumentation; that it's too fragmented; and that it has caused citizens to become too apathetic about important public issues. (McKee, 2005: 2)